

## **Framing Tirto.id Pada Pemberitaan Isu Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi**

Calvin Damasemil<sup>1</sup>, Ade Devia Pradipta<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Universitas Udayana, Denpasar, Indonesia

### **ABSTRAK**

Kekerasan seksual dan berbasis gender kerap terjadi di sekitar kita, bahkan di lingkungan perguruan tinggi. Dari tahun 2015-2021 terdapat 35 laporan kekerasan seksual di perguruan tinggi masuk ke Komnas Perempuan. Tingginya angka kekerasan seksual di lingkungan pendidikan Perguruan Tinggi, berdampak pada diterbitkannya Permendikbud No. 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penangan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi. Salah satu media online yang cukup serius memberitakan tentang kasus kekerasan seksual di Perguruan Tinggi adalah Tirto.id. Tirto.id pernah membuat pemberitaan yang berisi testimoni para penyintas kekerasan seksual di beberapa kampus di Indonesia. Melalui metode analisis pembingkai berita Pan & Kosicki, posisi Tirto.id mengenai kelompok kekerasan seksual di perguruan tinggi cenderung bias kepada korban karena Tirto.id juga melakukan advokasi terhadap korban. Tirto.id tidak melakukan dramatisasi dengan tidak memberikan opini yang menggiring, namun menyampaikan kronologi dan fakta dari sisi korban. Tirto.id juga masih mengedepankan asas praduga tak bersalah pada pelaku karena kasusnya yang masih dalam penyelidikan.

**Kata Kunci:** Analisis Framing, Kekerasan Seksual, Perguruan Tinggi, Media Online, Tirto.id.

### **ABSTRACT**

Sexual and gender-based violence is common all around us, even in college settings. From 2015 to 2021, there were 35 reports of sexual violence in college entering the Women's Chamber. The high rate of sexual abuse in college education, impacted on the publication of Permendikbud No. 30 Year 2021 on Prevention and Suppression of Sexual Violence in College. One of the most serious online media outlets reporting on cases of sexual violence in colleges is Tirto.id. Through Pan & Kosicki's analysis of the news, Tirto.id's position on college sexual assault groups tends to be biased on victims because Tirto is also advocating victims. Tirto.id doesn't dramatize by not giving a flattering opinion, but by providing chronology and facts on the victim's side. Tirto.id also continues to advance the presumption of innocence of the perpetrator because of his case which is still under investigation.

**Keywords:** Framing Analysis, Sexual Violence, College, Online Media, Tirto.id.

## PENDAHULUAN

Kekerasan seksual dan berbasis gender kerap terjadi di sekitar kita, bahkan terjadi di lingkungan perguruan tinggi. Komnas Perempuan menyatakan bahwa dari tahun 2015-2021 terdapat 35 laporan kekerasan seksual di perguruan tinggi masuk ke Komnas Perempuan. Kekerasan yang terjadi di lingkungan Pendidikan, meliputi kekerasan seksual sebanyak 87,91%, psikis dan diskriminasi 8,8%, diikuti dengan kekerasan fisik 1,1%. Berdasarkan data Komnas Perempuan, pelaku kekerasan berbasis gender terhadap perempuan dari tahun 2015-2021 ada 67 pelaku dengan rincian sebagai berikut: guru 28 orang, dosen 15 orang, peserta didik 10 orang, kepala sekolah 9 orang, pelatih 2 orang, dan lain-lain 3 orang (VOA Indonesia, 2022).

Tingginya angka kekerasan seksual di lingkungan Pendidikan, terutama Perguruan Tinggi, berdampak pada diterbitkannya Permendikbud No. 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi. Permendikbud ini diharapkan mampu merespons situasi darurat kekerasan seksual yang terjadi di Universitas. Salah satu bentuk tindak lanjut dari diterbitkannya Permendikbud ini adalah dengan dibentuknya Satuan Tugas Penanganan Kekerasan Seksual di berbagai Universitas yang terdiri dari dosen, tenaga kependidikan, dan juga mahasiswa.

Lingkungan pendidikan idealnya adalah ruang yang aman dan nyaman bagi para pelajar untuk menuntut ilmu dan berproses sebagai mahasiswa justru menjadi tempat pelaku kekerasan seksual melakukan aksinya. Pada tahun 2021, muncul tagar #NamaBaikKampus, sebanyak 174 penyintas yang berasal dari 79 kampus di 29 kota di Indonesia mengungkapkan kekerasan seksual yang pernah dialami oleh mereka (Tirto, 2021). Liputan yang dinisiasi oleh beberapa media online Indonesia (Tirto.id, VICE, dan The Jakarta Post) dipicu oleh kasus kekerasan seksual yang terjadi pada mahasiswi UGM pada tahun 2018.

Kasus kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan Perguruan Tinggi tak luput dari sorotan media, baik media cetak, elektronik, maupun media daring. Pemberitaan terkait kasus ini cukup menyita perhatian publik karena dilakukan di lingkungan yang seharusnya menciptakan generasi intelektual. Sejumlah media besar seperti Tempo.co, Kompas, VOA Indonesia, Tirto, dan beberapa media lainnya juga melakukan pemberitaan terkait kekerasan seksual di Perguruan Tinggi. Pemberitaannya tidak hanya berpusat pada kasus yang terjadi, namun juga pada sosialisasi tentang Permendikbud No. 30 Tahun 2021.

Salah satu media online yang cukup serius memberitakan tentang kasus kekerasan seksual di Perguruan Tinggi adalah Tirto.id. Tirto.id bahkan pernah membuat pemberitaan yang berisi testimoni para penyintas kekerasan seksual di beberapa kampus di Indonesia. Dalam hal ini, Tirto.id memberikan ruang bagi para penyintas untuk menyampaikan apa yang mereka alami pada saat kejadian tersebut. Berdasarkan observasi pada situs pencarian, jumlah entri berita terkait kekerasan dan pelecehan seksual dari rentang 2019-2022 di Tirto.id mencapai 568 berita. Tirto.id sebagai salah satu media online memiliki peran penting dalam menyampaikan informasi di sekitar kita. Pemberitaan tiap media memiliki cara pandang tersendiri dan cara

masing-masing untuk menonjolkan sebuah peristiwa. Hal tersebut berhubungan dengan realitas sosial yang dibentuk oleh media.

Media massa, baik cetak maupun online, memiliki peran penting dalam mengkonstruksi realitas tentang dunia sosial. Media massa juga mampu memberikan penekanan atas suatu isu agar isu tersebut dianggap penting oleh publik. Lippman (1922 dalam Morissan, 2013: 496) menyatakan bahwa lingkungan masyarakat yang sesungguhnya adalah terlalu besar, kompleks, dan terlalu cepat untuk dikenali secara langsung. Secara lebih sederhana, Lippman menyatakan bahwa manusia harus merekonstruksikan lingkungan melalui model yang lebih sederhana sebelum kita mengelola lingkungan tersebut.

Dengan kata lain, media massa memegang peranan penting dalam menyeleksi informasi yang akan disampaikan dan bagaimana menyampaikannya. Informasi yang diketahui oleh publik mengenai suatu peristiwa sebagian besar ditentukan oleh proses penyaringan dan pemilihan berita yang dilakukan oleh media massa. Lebih lanjut, media massa menjadi tokoh penting dalam membangun isu umum dan aspek dari isu umum tersebut yang dinilai penting untuk dilaporkan (Morissan, 2013). Seleksi isu yang dilakukan oleh media kerap disebut dengan agenda media yang dieksekusi dengan melakukan pemingkai atau framing berita.

Berdasarkan pemilihan isu dan penempatan berita, peneliti berasumsi bahwa Tirto.id melihat kasus kekerasan seksual yang terjadi di Perguruan Tinggi ini memiliki kadar kepentingan luar biasa karena diberitakan secara konsisten, bahkan sampai terdapat liputan khusus untuk membahas sebuah peristiwa kekerasan seksual dalam sebuah Perguruan Tinggi, juga dalam sebuah peristiwa kekerasan seksual diberitakan secara terus menerus sampai beberapa kali penayangan. Dalam penelitian kali ini akan mengungkap bagaimana kekerasan seksual yang terjadi di perguruan tinggi dalam prespektif media Tirto.id dibingkai.

## **METODOLOGI PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek yang diteliti. Penelitian jenis ini akan menghasilkan data deskriptif berupa kata atau kalimat tertulis. Penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivis yang memandang realitas kehidupan sosial bukanlah realitas yang natural, melainkan hasil konstruksi di mana kebenaran suatu fakta bersifat relatif, berlaku sesuai konteks tertentu (Eriyanto, 2002: 43). Pendekatan ini menggunakan metode analisis *framing* model yang dikembangkan oleh Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki. Analisis *framing* memungkinkan ideologi atau metode media untuk merekonstruksi peristiwa (Sobur, 2002: h. 162). Pendekatan kualitatif adalah proses penelitian yang menghasilkan data deskriptif dalam bentuk teks atau ucapan orang dan perilaku yang dapat diamati, menurut Bogdan dan Taylor (Moleong, 2014: h. 4). Data dalam penelitian ini berasal dari sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer dalam penelitian ini adalah artikel berita pada media *online* Tirto.id periode Oktober 2018-Januari 2019. Sumber sekunder dalam penelitian

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pan dan Kosicki (1993) menyatakan bahwa terdapat keterkaitan dua konsep dalam melakukan analisis framing, yaitu konsep psikologis dan konsep sosiologis. Konsep psikologis adalah konsep yang lebih menekankan pada bagaimana wartawan memproses informasi pada dirinya sendiri. Di lain sisi, konsep sosiologis menjelaskan bagaimana wartawan melakukan pembingkaiian dengan memperhatikan latar belakang lingkungan sosial yang dikonstruksi seseorang. Lebih lanjut, Pan dan Kosicki memiliki perangkat framing untuk membantu analisis teks media. Perangkat framing tersebut terbagi menjadi 4 struktur, yaitu struktur sintaksis, struktur skrip, struktur tematik, dan struktur retorik. Hasil analisis dari keempat berita tersebut terlihat pada Tabel 1.

Sejalan dengan hal tersebut, dengan membaca dan mengumpulkan data dari Tirto.id terkait topik pemberitaan “Berita Kasus Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi” memudahkan penulis dalam membandingkannya dan mencari bahasa karakteristik dari Tirto.id. Tirto.id awalnya memberitakan kasus tentang kekerasan seksual di Perguruan Tinggi pada tahun 2019. Tirto memberitakan kasus ini dengan judul “Testimoni Kekerasan Seksual: 174 Penyintas, 79 Kampus, 29 Kota” pada segemen *Indepth*. Berita ini berisi tentang data-data statistik berupa pictogram yang menggambarkan sebaran lokasi, pelaku, TKP, serta siapa saja korban kekerasan seksual di lingkungan kampus. Lebih lanjut, Tirto melakukan pemberitaan terkait hal ini sampai tahun 2023. Terdapat 4 artikel berita yang digunakan sebagai analisis pembingkaiian dalam penelitian ini.

Analisis pembingkaiian berita tentang kekerasan seksual di perguruan tinggi pada portal berita online tirto.id dilakukan dengan melihat struktur berita menggunakan model Pan & Kosicki. Berdasarkan analisis dari model pembingkaiian Pan dan Kosicki ditemukan bahwa Tirto.id melakukan beberapa pembingkaiian isu terkait kekerasan seksual di perguruan tinggi. Hasil analisis framing pada pemberitaan tirto.id terlihat pada Tabel 1.

**Tabel 1. Framing Pan & Kosicki pada Pemberitaan Kasus Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi di tirto. id**

Struktur	Berita 1	Berita 2	Berita 3	Berita 4
	<b>“Kekerasan Seksual di Kampus Masif, Permendikbud PPKS Jadi Solusi?”</b>	<b>“Merunut Pelecehan Seksual IAIN Kediri: Korban Berharap Keadilan”</b>	<b>“Polemik Permen PPKS saat Kasus Pelecehan Seksual di kampus marak”</b>	<b>“Pelecehan Seksual Mahasiswi UNRI: Dahulukan Kasus Pengusutan Korban”</b>
<b>Sintaksis</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• “Kekerasan Seksual di Kampu Masif, Permendikbud PPKS Jadi Solusi?”</li> <li>• KOMPAKS mendorong percepatan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Merunut Pelecehan Seksual IAIN Kediri: Korban Berharap Keadilan</li> <li>• Dugaan kasus kekerasan seksual yang dilakukan dosen Institut Agama Islam Negeri</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Polemik Permen PPKS saat Kasus Pelecehan Seksual di Kampus Marak</li> <li>• Munculnya Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelecehan Seksual Mahasiswi UNRI: Dahulukan Kasus Korban</li> <li>• LPSK siap berikan perlindungan kepada korban pelecehan seksual di Unri dan</li> </ul>

<p>pelaksanaan Permendikbudri stek PPKS merespons masifnya kasus kekerasan seksual di kampus</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kasus kekerasan seksual yang menimpa mahasiswa Universitas Riau dan pengakuan Rektor Universitas PGRI Argopuro Jember tentang pelecehan seksual yang dilakukannya.</li> <li>• “Namun dalam percakapan tersebut, beberapa kali pelaku mengatakan kata-kata yang membuat saya tidak nyaman, seperti ia mengatakan ‘I love you’ yang membuat saya merasa terkejut dan sangat tidak menerima perlakuan Bapak tersebut,”</li> <li>• “Saya sangat merasa ketakutan dan langsung menundukkan kepala saya. Namun pelaku segera mendongakkan kepala saya dan ia berkata, ‘Mana bibir, mana bibir’ yang membuat saya sangat terasah terhinah</li> <li>• Pernyataan penulis tentang</li> </ul>	<p>(IAIN) Kediri, Jawa Timur terhadap mahasiswinya mencuat. Korban menginginkan penyelesaian yang adil.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Harapan korban Kasus kekerasan seksual yang terjadi di IAIN Kediri agar mendapat keadilan</li> <li>• "Harapan korban ada penyelesaian yang adil bagi korban,"</li> <li>• "Kasus [kekerasan seksual itu] jelas ada. Kami sedang fokus [menanganinya]" kata Sardjuningsih.</li> <li>• Pernyataan Ketua Pusat Studi Gender dan Anak IAIN Kediri dan mahasiswa pendamping korban tentang kasus kekerasan seksual yang terjadi di kampus mereka.</li> <li>• Wakil Rektor III IAIN Kediri Wahidul Anam sebelumnya telah memberikan keterangan resmi kepada sejumlah media terkait kasus kekerasan seksual di kampusnya. Namun saat reporter Tirto berupaya melakukan konfirmasi ulang dan permintaan wawancara melalui pesan singkat tak direspons. Sementara panggilan telepon dialihkan.</li> </ul>	<p>Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Perguruan Tinggi menuai polemik.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perbedaan opini antara Kemenag, Kemen PPPA, KOMPAKS dengan MUI, PKS, dan Muhammadiyah.</li> <li>• “Kita tidak boleh menutup mata bahwa kekerasan seksual banyak terjadi di lingkungan pendidikan. Dan kita tidak ingin ini berlangsung terus menerus,”</li> <li>• “Kita melihat fakta bahwa kasus kekerasan seksual terjadi di lingkungan perguruan tinggi nyata adanya dan kerap tidak tertangani dengan semestinya,”</li> <li>• “Khususnya Islam yang menjunjung tinggi kemuliaan laki-laki dan perempuan dalam relasi mu’asyarah bil-ma’ruf (relasi kebaikan) berbasis ahlak mulia,”</li> <li>• “Pasal 5 Permendikbud Ristek No 30 Tahun 2021 menimbulkan makna legalisasi terhadap perbuatan asusila dan seks bebas berbasis persetujuan,”</li> <li>• Segmen 1: Pernyataan Kementerian Agama dan Kemen PPPA yang menyetujui adanya Permen PPKS untuk</li> </ul>	<p>minta pihak kampus mengedepankan perspektif korban.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kronologi kejadian pelecehan seksual di Universitas Riau yang menimbulkan saling serang antara korban dengan pihak pelaku Ketika dipertemukan oleh pihak kampus. Korban juga mendapat serangan dengan tuntutan pencemaran nama baik.</li> <li>• “Ia (Syafri) mengatakan ‘I love you’ yang membuat saya merasa terkejut dan (saya) tidak menerima perlakuan bapak,”</li> <li>• (Perlakuan Syafri) membuat saya merasa terhina, terkejut, badan saya lemas. Saya ketakutan. Setelah saya dorong badan Pak Syafri ia mengatakan ‘ya sudah kalau gak mau’,”</li> <li>• “Beliau menghalang-halangi saya untuk mendapatkan keadilan atas perlakuan yang tidak pantas,”</li> <li>• “Awalnya saya kira bapak (dosen) tersebut mendukung dan ingin melindungi saya, ternyata tidak. Di depan ketua jurusan ia menyalahkan saya atas kecerobohan saya yang tidak menggunakan SK dalam bimbingan proposal. Dia mementingkan SK ketimbang kasus pelecehan seksual yang saya terima.”</li> </ul>
---	--	---	---

- kasus pelecehan yang dialami korban di beberapa perguruan tinggi dan implementasi Permen PPKS
- Mengajak semua pihak untuk memusatkan focus pada implementasi Permen PPKS dan upaya bersama untuk menjaga hak-hak kita, termasuk korban kekerasan seksual di lingkungan kampus sebagai warga negara yang berhak atas Pendidikan tinggi yang aman, sehat, dan nyaman.
- menanggulangi kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi
- Segmen 2: Penolakan beberapa pasal dalam Permen PPKS yang menurut Muhammadiyah tidak sesuai dengan nilai-nilai agama.
  - Segmen 3: SETARA Institute mendesak pemerintah untuk melakukan sosialisasi massif terhadap Permen PPKS.
  - Segmen 4: Respons Kemendikbudristek yang menyatakan bahwa Permen PPKS telah sejalan dengan Undang-undang.
  - “Kekerasan seksual merupakan salah satu penghalang tercapainya tujuan pendidikan tersebut,” kata dia.
- “Karena saya tidak berbuat, saya tidak pernah diklarifikasi, saya tidak pernah dikonfirmasi, saya merasa dirugikan, nama baik saya tercemar. Maka saya secara hukum akan menuntut balik. Ke mana pun saya akan menuntut balik,”
  - “Karena masih ada pihak-pihak yang menghubungi korban maupun keluarga korban, baik dengan nomor baru atau secara langsung,”
  - “Kami berharap kepolisian bijak mencermati substansi Surat Keputusan Bersama Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik,”
  - “Intinya bila dalam video atau sebuah unggahan yang disebar merupakan suatu fakta, maka proses itu harus dibuktikan terlebih dahulu. Kami meminta kepolisian yang menerima atau memeriksa laporan terduga pelaku terkait UU ITE untuk tidak melanjutkan laporan tersebut,”
  - “LPSK siap berikan perlindungan kepada korban. Kami mengimbau agar pihak kampus mengedepankan perspektif korban dan fasilitatif terhadap proses pemeriksaan etik maupun hukum kepada terduga pelaku,
  - “Kemendikbudristek tidak memberi toleransi atas

					kekerasan dan kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan kampus. Institusi pendidikan yang baik adalah melindungi warganya dari kejahatan dan kekerasan seksual,”
					<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pernyataan kronologi kejadian dari mahasiswi yang menjadi korban pelecehan seksual.</li> <li>• Penjelasan dari dosen terduga pelaku pelecehan</li> <li>• Pernyataan dari Lembaga Bantuan Hukum yang berfokus pada perspektif korban.</li> <li>• Menjabarkan pernyataan dari LPSK, Kriminolog Australian National University, dan respons Dirjen Dikti.</li> </ul>
<b>Skrip</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>What:</i> Upaya percepatan pelaksanaan Permendikbudri stek PPKS untuk merespons masifnya kasus kekerasan seksual di kampus.</li> <li>• <i>Where:</i> Jakarta</li> <li>• <i>When:</i> 2021</li> <li>• <i>Who:</i> KOMPAKS</li> <li>• <i>Why:</i> Semakin masifnya kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi</li> <li>• <i>How:</i> Penerbitan Permendikbudri stek PPKS</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>What:</i> Upaya korban kasus pelecehan seksual di IAIN Kediri untuk mendapatkan keadilan. Selain itu terdapat intimidasi dari pihak universitas.</li> <li>• <i>Where:</i> Kediri</li> <li>• <i>When:</i> 2021</li> <li>• <i>Who:</i> Ketua PSGA IAIN Kediri</li> <li>• <i>Why:</i> Kasus kekerasan seksual yang menimpa mahasiswa IAIN Kediri belum mendapat keadilan dan korban serta pendamping mendapat intimidasi.</li> <li>• <i>How:</i> Kekerasan seksual awalnya terjadi melalui aplikasi pesan teks kemudian terjadi tindakan kekerasan yang dialami ketika bimbingan skripsi.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>What:</i> Perbedaan pendapat antara beberapa kementerian dan organisasi terkait terbitnya Permen PPKS sebagai solusi kekerasan seksual di perguruan tinggi.</li> <li>• <i>Where:</i> -</li> <li>• <i>When:</i> 2021</li> <li>• <i>Who:</i> Menteri Agama, Menteri PPPA, Perwakilan Muhammadiyah, Anggota DPR Fraksi PKS, SETARA Institute, Kabiro Kerja sama dan Humas Kemendikburistik</li> <li>• <i>Why:</i> Menurut Muhammadiyah, PKS, dan MUI, Beberapa pasal yang ada dalam Permen PPKS dianggap tidak sesuai dengan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>What:</i> Kasus pelecehan seksual di UNRI yang berujung pada laporan pencemaran nama baik oleh dosen terduga pelaku terhadap korban.</li> <li>• <i>Where:</i> Riau</li> <li>• <i>When:</i> 2021</li> <li>• <i>Who:</i> L (Korban); Syafrri (dosen terduga pelaku); Rian Sibarani (LBH); Leopold Suryono (kriminolog); Ketua LPSK; dan Nizam (Dirjen Dikti).</li> <li>• <i>Why:</i> Terjadi saling lapor antara korban dengan terduga pelaku setelah kejadian pelecehan.</li> <li>• <i>How:</i> LPSK dan LBH mengedepankan perlindungan kepada korban; kriminolog menyarankan agar kasus diselesaikan</li> </ul>	

	<p>Korban dan pendamping juga mendapat intimidasi dari pihak kampus.</p>	<p>nilai-nilai agama karena berfokus pada <i>consent</i>. Sedangkan menurut Kementerian terkait hal tersebut telah sesuai dengan undang-undang.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>How</i>: Beberapa diksi pada pasal Permen PPKS dianggap bernuansa liberalisme dan eolah membenarkan perilaku seks di luar nikah.</li> </ul>	<p>satu persatu. Dirjen Dikti menjelaskan bahwa Permen PPKS menjadi pedoman bagi perguruan tinggi untuk menyusun kebijakan dan mengambil Tindakan dan penanganan terhadap pelecehan seksual di kampus.</p>
<p><b>Tematik</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Seluruh berita berbicara tentang kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan kampus dan bagaimana Menristek mengeluarkan Permen untuk menanggulangi hal tersebut. Pemberitaan menggunakan kata ganti “pelaku” untuk menggambarkan Rektor UNRI. Terdapat hubungan antar kalimat berupa penguatan dan penambahan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Segmen 1 berita menceritakan tentang kronologi tindak kekerasan seksual yang menimpa mahasiswa di IAIN Kediri. Segmen 2 menjelaskan upaya mahasiswa mendorong kampus untuk melakukan penindakan kepada dosen yang melakukan kekerasan/pelecehan seksual.</li> <li>• Kalimat yang digunakan mengutip sumber langsung dan menggunakan kata ganti orang kedua</li> <li>• Hubungan antar kalimat berupa penegasan, penguatan, dan kebalikan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Berita terdiri empat segmen yang berisi polemic antara Kemenag, Kemen PPPA, Kompaks dengan Muhammadiyah dan PKS tentang Permen PPKS. Segmen terakhir berisi tentang respons Kemendikbudritek terhadap polemic yang terjadi.</li> <li>• Kalimat yang digunakan mengutip sumber langsung dan menggunakan kata ganti orang pertama dan kedua.</li> <li>• Hubungan antar kalimat berupa penegasan, penguatan, dan kebalikan. Kalimat pertentangan dan penguatan dipisah menjadi 2 kalimat.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Berita terdiri empat segmen yang menjelaskan kronologi dari korban dan terduga pelaku, serta sudut pandang LBH, LPSK, dan respon Kemendikbudristek terhadap pelecehan seksual di UNRI.</li> <li>• Pada segmen 1 yang menceritakan kronologi kejadian dari sisi korban, digunakan pernyataan langsung dengan kata ganti orang pertama dan kedua. Pemberitaan tetap melindungi korban dengan menyamarkan identitas korban melalui penggunaan inisial. Namun, nama terduga pelaku disebutkan dengan jelas tanpa disamarkan.</li> <li>• Paragraf disusun berdasarkan pernyataan dari pihak-pihak yang terkait kasus tanpa adanya opini dari wartawan</li> <li>• Hubungan antar kalimat berupa</li> </ul>

				penegasan, penguatan, dan kebalikan.
<b>Retoris</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Foto/gambar yang digunakan berupa ilustrasi pelecehan seksual.</li> <li>Menggunakan kata “asusila” untuk menggambarkan tindak pelecehan seksual di lingkungan kampus.</li> <li>Tindak pelecehan dan atau kekerasan seksual di perguruan tinggi dinyatakan dengan kata pencabulan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Foto/gambar yang digunakan berupa ilustrasi pelecehan seksual.</li> <li>Identitas mahasiswi pendamping dan teman korban dirahasiakan dengan menggunakan nama samara.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Foto/gambar yang digunakan berupa ilustrasi kekerasan seksual seksual</li> <li>Terdapat beberapa istilah hukum yang digunakan Ketika membahas pasal Permen PPKS.</li> <li>Terdapat diksi dengan Bahasa Arab untuk menjelaskan Permen PPKS dengan nilai agama Islam menurut Muhammadiyah.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Foto/gambar yang digunakan berupa ilustrasi kekerasan seksual seksual</li> <li>Terdapat diksi dalam Bahasa Arab yang digunakan oleh terduga pelaku untuk menyatakan bahwa kasus yang menyimpannya merupakan ranah privat.</li> <li>Terduga pelaku juga menyebutkan “sumpah pocong” untuk menegaskan ketidakbersalahannya.</li> <li>Tidak ada grafik yang digunakan untuk memperkuat data wartawan.</li> </ul>

Sumber : Data Olahan Peneliti

Berdasarkan analisis dari model pembingkaiian Pan dan Kosicki ditemukan bahwa Tirto.id melakukan beberapa pembingkaiian isu terkait kekerasan seksual di perguruan tinggi. Pembingkaiian pertama adalah tentang masifnya kekerasan seksual di kampus yang mendorong pemerintah melalui Kemendikbudristek untuk mengeluarkan Permen PPKS. Pada berita, kasus kekerasan seksual yang terjadi di Universitas Riau diceritakan secara mendetail sebagai latar informasi untuk mendorong percepatan Permen PPKS. Sudut pandang pemberitaan berasal dari pihak korban maupun pelaku. Dari pihak korban, pemberitaan menggunakan kutipan langsung dengan menyamarkan nama korban menggunakan inisial. Pengakuan dari pelaku ditulis dengan sudut pandang orang kedua namun tidak menceritakan kronologi secara detail. Kaidah pemberitaan seperti 5W+1H dilakukan dengan baik oleh Tirto.id sehingga informasi yang ditampilkan cukup lengkap. Kata ganti orang kedua dituliskan menjadi “pelaku” dan “Bapak” untuk menggambarkan Rektor UNRI yang melakukan pelecehan seksual. Pada struktur Retoris, gambar yang digunakan berupa ilustrasi karena topik pemberitaan yang sensitif. Tindak pelecehan dan atau kekerasan seksual dinyatakan dengan menggunakan kata “asusila” dan “pencabulan”. Kronologi berpusat pada korban, namun tidak ada penceritaan dari sisi pelaku. Klarifikasi dari perguruan tinggi dilakukan oleh Wakil Rektor III namun tidak memberikan konfirmasi tentang kejadian tersebut. Pemberitaan masih menekankan pada aspek korban dengan menyamarkan atau memberikan inisial pada korban dan pendamping korban. Pemberitaan kedua mengangkat topik pelecehan yang terjadi di salah satu perguruan tinggi berbasis agama di Kediri. Nama institusi disebutkan dengan jelas padahal Tindakan baru dugaan belum ada pengakuan pelaku seperti kasus di Universitas Riau.

Berdasarkan seluruh hasil pembingkaiian tersebut, secara umum Tirto.id sudah menerapkan

beberapa kaidah-kaidah jurnalisme dalam pemberitaannya. Meskipun terdapat beberapa berita yang tidak mengikuti 5W+ 1H. Hal ini disebabkan oleh karakteristik berita online yang mengedepankan kecepatan dalam memberikan informasi pada khalayak. Salah satu kaidah yang diabaikan dalam pemberitaan adalah unsur 5W+1H yang merupakan syarat kelengkapan dalam menulis berita. Van Dijk (1988: 50) menyatakan bahwa skrip berita memiliki struktur yang jelas yang digambarkan melalui aturan yang disebut dengan story grammars. Unsur 5W+1H merupakan versi umum dari aturan penulisan berita yang disebutkan oleh Van Dijk. Meskipun unsur tersebut tidak harus ditampilkan secara eksplisit dalam berita, namun unsur 5W+1H merupakan hal yang diharapkan ada dalam sebuah berita (Pan & Kosicki, 1993). Selain mengabaikan unsur-unsur tersebut, Tirto.id juga memiliki kelemahan dalam memberikan variasi informasi pada isi berita. Hal ini terlihat dengan hanya menyampaikan sudut pemberitaan dari pihak korban dan mengaitkan keseluruhan kasus dengan Permen PPKS.

Entman (1993) menyatakan bahwa aspek utama dalam pbingkaiian sebuah berita adalah menyatakan permasalahan, mendiagnosis penyebab, melakukan penilaian moral, dan mengusulkan perbaikan. Aspek-aspek tersebut mencakup penggunaan frase dan kata-kata tertentu, menentukan referensi kontekstual, memilih gambar/foto yang relevan, memberikan contoh, dan mengacu pada sumber-sumber berita (McQuail, 2010: 310). Terdapat diksi dalam Bahasa Arab karena hal tersebut relevan dengan kasus pelecehan yang terjadi di kampus berbasis agama. Tirto.id juga menggunakan ilustrasi pada pemberitaan yang berkaitan dengan kasus pelecehan seksual. Misalnya, pada berita tentang pelecehan seksual di Universitas Riau, ilustrasi yang digunakan adalah dinosaurus (Raptor) memakai toga dengan latar foto beberapa hal yang terkait dengan perguruan tinggi. Ilustrasi ini menggambarkan adanya predator seksual di perguruan tinggi. Tirto.id menggunakan beberapa data statistik untuk memperkuat argument dan sebagai latar informasi terkait terbitnya Permen PPKS. Tirto.id juga membagi berita menjadi beberapa segmen yang tiap segmennya memberikan ruang kepada setiap narasumber untuk beropini.

Pemberitaan mencantumkan lebih dari satu narasumber yang dibuat dalam kutipan langsung. Namun, karena ruang pemberitaan difokuskan pada korban keberimbangan pemberitaan belum dapat dikatakan baik. Tirto.id melakukan advokasi pada korban pelecehan seksual dengan memfokuskan kronologi dari sisi korban secara mendetail. Tirto.id juga mendorong korban untuk membuka diri sehingga kasus yang dialaminya dapat diselesaikan.

Pada Berita pelecehan di IAIN Kediri, meskipun telah menyampaikan dari sisi korban, informasi yang disampaikan tidak sedetail informasi dari korban. Pada berita ini dan keempat, Tirto.id masih berlandaskan asas praduga tak bermasalah karena kasusnya yang belum terkonfirmasi dan saling serang antara dosen dan mahasiswi. Tirto.id menggunakan kata “terduga pelaku” untuk menceritakan dari sisi pelaku. Berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan model Pan & Kosicki dapat dilihat bahwa kata-kata pada pemberitaan yang dilakukan oleh Tirto.id juga menggunakan beberapa sinonim untuk menggambarkan kekerasan seksual di perguruan tinggi, seperti Tindakan asusila dan pelecehan. Namun, Tirto.id tidak memasukkan unsur dramatis pada berita tentang kekerasan seksual di perguruan tinggi. Tirto.id memilih kata dan opini yang cenderung netral dalam pemberitaannya. Hal ini karena

topik berita yang sensitif dan kurangnya kemauan korban untuk menyampaikan hal yang dialami dan pihak kampus yang cenderung menutupi. Dari keseluruhan pemberitaan terlihat bahwa agenda yang ingin ditampilkan oleh Tirto.id adalah memberi ruang advokasi pada korban dan mendorong pemerintah dan pihak-pihak terkait untuk mempercepat Permen PPKS sebagai solusi kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi. Pemberitaan yang dilakukan oleh tirto.id tentang kekerasan seksual di perguruan tinggi dapat dikatakan sesuai dengan peristiwa yang baru terjadi, sesuai dengan fakta, dan penting bagi khalayak. Tirto.id dalam pemberitaannya menerapkan jurnalisme berbasis gender yang merupakan upaya untuk menghasilkan berita yang seimbang dan adil serta tidak bias gender (Hardiansya et al., 2017). Hal ini terlihat dari kehati-hatian tirto.id dalam memilih diksi dalam berita untuk tidak merendahkan korban dan berfokus pada kronologi kejadian. Selain itu, jurnalisme berbasis gender ini juga digunakan oleh tirto.id untuk memenuhi objektivitas pemberitaan pada isu-isu yang sensitif.

## SIMPULAN

Analisis pembedakan berita dilakukan dengan melihat empat struktur, yaitu struktur sintaksis, struktur skrip, struktur tematik, dan struktur retorik. Sebanyak 4 berita yang terbit pada tahun 2020-2021 dianalisis untuk melihat pembedakan Tirto.id terhadap isu kekerasan seksual di perguruan tinggi. Terdapat beberapa pembedakan isu yang dilakukan oleh Tirto.id, yaitu: masih adanya ketakutan kekerasan seksual di perguruan tinggi untuk menyampaikan hal yang dialami, polemik Permen PPKS, serta adanya intimidasi kepada korban. Tirto.id sudah menerapkan kaidah-kaidah jurnalisme dalam pemberitaannya. Tirto.id juga sudah cukup variatif dalam memberikan informasi, karena menggunakan narasumber dari pihak-pihak terkait dan menggunakan kutipan langsung. Selain itu, Tirto.id juga menggunakan foto atau gambar berupa ilustrasi yang relevan dengan pemberitaan karena topik yang sensitif. Posisi Tirto.id mengenai kelompok kekerasan seksual di perguruan tinggi cenderung bias kepada korban karena Tirto.id juga melakukan advokasi terhadap korban. Tirto.id tidak melakukan dramatisasi dengan tidak memberikan opini yang menggiring, namun menyampaikan kronologi dan fakta dari sisi korban. Tirto.id juga masih mengedepankan asas praduga tak bersalah pada pelaku karena kasusnya yang masih dalam penyelidikan

## DAFTAR PUSTAKA

- Bungin, Burhan. (2003). *Analisis Data Penelitian Kualitatif "Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi"*. Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Dijk, T. A. van. (1988). *News as Discourse*. New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates, Publishers.
- Eriyanto. (2001). *Analisis Wacana: Pengantar Analisis Teks Media*. Yogyakarta: LKiS Yogyakarta.
- \_\_\_\_\_. (2002). *Analisis Framing, Konstruksi, Ideologi, dan Politik*. Yogyakarta: LKiS.

- Gamson, W. A., & Modigliani, A. (1987). The changing culture of affirmative action. In R. G. Braungart & M. M. Braungart (Eds.), *Research in political sociology*. Greenwich, CT: JAI Press.
- Goffman, Erving. (1974). *Frame Analysis: an Essay on the Organization of Experience*. Cambridge: Harvard university Press.
- Hardiansya, R., Palulungan, L., & K, M. G. H. K. (2017). Panduan Jurnalis Berperspektif Perempuan dan Anak. 1–88.
- Ishak, D. (2020). Pelecehan Seksual di Institusi Pendidikan : Sebuah Perspektif Kebijakan. *AKSELERASI: Jurnal Ilmiah Nasional* Vol. 2 No. 2, 136-144.
- Kemdikbudristek. (2021). “Salinan Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Kekerasan Seksual”. <https://jdih.kemdikbud.go.id/>. (diakses pada tanggal 20 Januari 2022).
- Kriyantono, Rachmat. (2012). *Teknis Praktis Riset Komunikasi*. Jakarta. Kencana.
- McQuail, D. (2010). *McQuail's Mass Communication Theory*. Netherlands: SAGE Publications, Ltd.
- Morissan. (2013). *Teori komunikasi: Individu Hingga Massa*. Jakarta : Kencana.
- Sobur, Alex. (2001). *Analisis Teks Media, Suatu Pengantar Untuk Analisis Wacana, Analisis Semiotik, dan Analisis Framing*. Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Tirto. (2021). *Testimoni Kekerasan Seksual: 174 Penyintas, 79 Kampus, 29 Kota*. Dipetik 11 23, 2021, dari Tirto Website: <https://tirto.id/testimoni-kekerasan-seksual-174-penyintas-79-kampus-29->
- VOA Indonesia (2022). *Komnas Perempuan: Kasus Kekerasan Seksual di Lingkungan Pendidikan, Paling Tinggi di Universitas*. <https://www.voaindonesia.com/a/komnas-perempuan-kasus-kekerasan-seksual-di-lingkungan-pendidikan-paling-tinggi-di-universitas/6525659.html>. Diakses 2 Agustus 2024, pukul 17.01 WITA.